

**BUDAYA POLITIK MASYARAKAT LOKAL:
STUDI KASUS DI KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG
PASCA ORDE BARU**

*Political Cultural in Local Communities:
Case Study in the Banyumanik District, Semarang Municipal post New Order*

Arif Sofianto
Balitbang Provinsi Jawa Tengah

ABSTRACT

There were many changes of national politics at the procedural level after the 1998 reform that affect the community's political orientation and activities. The purpose of this study was to understand changes in national politics at the procedural level after the 1998 reform and their impact on a substantial change of political culture in local communities. This study used descriptive qualitative methods, and research sites in the District Banyumanik, Semarang Municipal. This study concludes that changes in national politics at the procedural level after the 1998 reform do not substantially affect the change of political culture in local communities.

Keywords: *Reform, Political Culture, Political Changes*

PENDAHULUAN

Perubahan politik di Indonesia dalam satu dekade terakhir pascajatuhnya Orde Baru membawa pengaruh pada perubahan kesadaran dan aktifitas politik masyarakat. Demokrasi menjadi isu utama dalam penataan struktur pemerintahan maupun tata kelola kehidupan masyarakat. Reformasi memberikan jalan bagi internalisasi nilai-nilai demokrasi ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yang diharapkan mengakar menjadi budaya politik demokratis. Akan tetapi menurut beberapa pihak nilai-nilai demokrasi yang dipahami kebanyakan orang justru sering menunjukkan demokrasi semu atau bahkan berbeda sama sekali dengan demokrasi sesungguhnya.

Dalam ringkasan disertasinya yang berjudul *Demokrasi Setengah Hati: Studi Kasus Elite Politik di DPR RI 1999-2004*, Marhan (2009:22-23) menunjukkan bahwa

elite politik masih bekerja setengah hati dan tidak sungguh-sungguh memperjuangkan agenda-agenda demokrasi, karena masih mengutamakan kepentingan subjektifnya, membuat harapan masyarakat menjadi sirna sehingga muncul ketidakpercayaan politik terhadap para elit. Penelitian yang dilakukan Priyono, dkk. (Yayasan Demos) tentang masalah-masalah demokrasi pada tahun 2003 yang diterbitkan dalam *Majalah Tempo* (10 Oktober 2004: 65-70) menyebutkan bahwa ada kekuatan elit lama Orde Baru atau elit baru yang muncul setelah Orde Baru tumbang telah menjadi kekuatan baru di bidang ekonomi, birokrasi dan militer yang memegang peran menentukan yang mengambil keuntungan dengan menjalankan kepentingan mereka melalui mekanisme dan prosedur demokrasi, namun substansinya tidak demokratis dan

membuat transisi menuju demokrasi macet di tengah jalan.

Di tingkat bawah, masyarakat yang sebelumnya lemah dihadapan rezim otoriter memaknai reformasi sebagai pembebasan dari kehadiran kekuasaan negara yang mengatur. Ekspresi reformasi merupakan wujud euforia politik untuk melakukan perlawanan terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan kekuasaan negara dengan segala perangkatnya. Sutoro Eko (2004:55-56) menyoroti bahwa pascareformasi muncul hal baru dalam protes sosial yang menyebar di hampir semua daerah, yang tidak lagi mengangkat isu-isu kebijakan pemerintah atau penggusuran tanah, tetapi berkobar relatif seragam sebagai gerakan sehari-hari untuk menjatuhkan para pemimpin lokal ketika saluran-saluran konvensional seperti partai dan parlemen tidak *legitimate* di mata publik. Dalam wacana masyarakat lokal, demokrasi dimaknai sebagai liberalisasi politik yang berwajah protes sosial berupa aksi menjatuhkan pemimpin-pemimpin yang bermasalah (Sutoro Eko, 2004:61).

Haynes (2000:134-137) menggambarkan bahwa di kebanyakan negara dunia ketiga, transisi demokrasi lebih banyak memperlihatkan wajah demokrasi formal, hanya terlihat di permukaan yang tidak membawa ke arah substantif. Demokrasi formal terpusat pada prosedur dan tata kelembagaan, fokus pada aturan ketentuan yang bermakna untuk menentukan perilaku dan kandungan dari pemilihan umum. Demokrasi substantif lebih berpusat pada nilai, mengutamakan terpenuhinya nilai-nilai demokrasi, memberikan ruang dan kebebasan ekspresi bagi kelompok yang lemah sekalipun.

Isu di atas terkait berbagai perubahan politik dalam masyarakat, baik dalam politik nasional maupun lokal yang menarik untuk dibahas melalui perspektif

budaya politik, bagaimana perubahan dan pergeseran nilai-nilai budaya akan mempengaruhi bentuk politik di masyarakat secara keseluruhan. Penelitian yang dilakukan oleh Zuhro, dkk (2009:268-269) tentang demokrasi dan budaya politik lokal pascareformasi, menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya politik demokratis dan nondemokratis tumbuh bersamaan dan berkesinambungan dalam masyarakat. Menurut Almond dan Verba (dalam Chilcote, 2007:302), budaya politik adalah orientasi politik dan sikap-sikap yang dipegang individu-individu dalam berhubungan dengan sistem politik mereka. Ada 3 Orientasi individu terhadap sistem politik yang menentukan tipe budaya politik suatu masyarakat. *Pertama*, orientasi kognitif yang berupa pengetahuan dan keyakinan mengenai sistem politik, para pemimpinnya dan operasinya. *Kedua*, orientasi afektif yaitu perasaan terhadap sistem politik, seperti rasa keterlibatan, atau pengucilan. *Ketiga*, orientasi evaluatif, merupakan penilaian dan opini tentang sistem politik. Berdasarkan orientasi diatas, ada 3 tipe budaya politik. *Pertama*, adalah budaya politik *parokial*, yaitu rendahnya pengharapan dan kepedulian individu-individu terhadap pemerintah dan umumnya merasa tidak terlibat. *Kedua*, budaya politik *subjek* di mana individu-individu peduli dengan keluaran yang dicapai pemerintah namun tidak berpartisipasi dalam proses yang menghasilkan keputusan-keputusan kebijakan. *Ketiga*, adalah budaya politik *partisipan* di mana individu-individu bersikap aktif dan terlibat dengan sistem secara utuh, yaitu dalam proses input, proses maupun outputnya. Budaya politik partisipan merupakan tingkat tertinggi yang dicapai dalam masyarakat modern di mana warga memahami peran dan posisinya serta memiliki peran dalam proses politik.

Budaya politik lokal masyarakat merupakan unsur pembangun budaya politik nasional yang mengalami berbagai perubahan penting pascareformasi, namun kajian terhadap hal tersebut masih jarang dilakukan. Kecamatan Banyumanik adalah salah satu wilayah yang cukup beragam secara sosial di Kota Semarang. Wilayah di pinggiran selatan Kota Semarang ini merupakan salahsatu pusat perkembangan permukiman dan industri. Terdapat beragam jenis komunitas di Kecamatan Banyumanik, yaitu permukiman tradisional, perumahan maupun campuran keduanya. Tingkat pendidikan, pekerjaan dan afiliasi masyarakat juga beragam. Ada masyarakat yang masih bercorak tradisional, terdidik dalam tradisi lokal, ada kalangan menengah perkotaan terdidik dalam tradisi modern. kerukunan beragama berjalan cukup baik, dalam berbagai kesempatan, seperti hajatan atau acara kematian, umat dari agama yang berbeda diundang untuk terlibat.

Dengan demikian, Kecamatan Banyumanik merupakan wilayah yang cukup unik dan menarik, serta mampu merepresentasikan pluralitas masyarakat. Berdasarkan alasan di atas, Kecamatan Banyumanik menjadi lahan menarik untuk mengkaji persoalan-persoalan politik pascareformasi yang dapat membantu memberikan gambaran secara lebih luas mengenai situasi politik pada masyarakat akar rumput.

TUJUAN

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah menganalisis situasi politik terkini pada tataran masyarakat akar rumput dalam perspektif budaya politik. Apakah perubahan politik pada level prosedural pascareformasi tersebut mampu memberikan kontribusi bagi situasi politik di tingkat masyarakat Kecamatan Banyumanik saat ini

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dilakukan untuk mengetahui keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana, berapa banyak, sejauh mana dan sebagainya (Arikunto, 2002:30). Pendekatan yang digunakan dalam studi ini adalah kualitatif, di mana data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif (Sugiyono, 2009:7-9). Perspektif yang digunakan ialah pluralisme sesuai konsep David Apter, merupakan gabungan antara pendekatan kelembagaan dan pendekatan perilaku dalam studi ilmu politik (Leo Agustino, 2007:14). Subjek penelitian atau populasi dalam penelitian ini ialah masyarakat di Kecamatan Banyumanik. Secara garis besar informan berasal dari 3 kelompok, yaitu aparat pemerintah, tokoh masyarakat atau pengurus organisasi masyarakat dan warga biasa. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini ialah panduan wawancara dan daftar pertanyaan terbuka. Penelitian ini menggunakan teknik analisis yang dikembangkan oleh Spradley (Iskandar, 2008:224-227, Sugiyono, 2009:243-266). Analisis model Spradley merupakan kesatuan proses linear yang dimulai dari analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial dan analisis tema budaya.

HASIL PENELITIAN

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa penelitian ini merupakan upaya menganalisis situasi politik saat ini (pascareformasi) di tingkat akar rumput atau masyarakat bawah. Sesuai konsep Almond dan Verba, budaya politik adalah orientasi politik dan sikap-sikap yang dipegang individu-individu dalam berhubungan dengan sistem politik mereka. Ada 3 Orientasi individu terhadap sistem politik yang menentukan tipe budaya politik suatu masyarakat. *Pertama*, orientasi kognitif yang berupa

pengetahuan dan keyakinan mengenai sistem politik, para pemimpinnya dan operasinya. *Kedua*, orientasi afektif yaitu perasaan terhadap sistem politik, seperti rasa keterlibatan, atau pengucilan. *Ketiga*, orientasi evaluatif, merupakan penilaian dan opini tentang sistem politik. Dengan demikian, analisis difokuskan pada ketiga konsep orientasi tersebut.

Orientasi Kognitif

Berbagai perubahan penting telah terjadi pascareformasi, baik dalam struktur politik, ekonomi maupun sosial. Pergantian rezim dan struktur politik berjalan begitu cepat dan drastis, sehingga menimbulkan berbagai efek samping yang mengancam stabilitas politik. Perubahan struktur ekonomi memberikan dampak yang luas dalam masyarakat. Liberalisasi menjadi agenda utama yang memberikan arah pembangunan Indonesia. Arah pembangunan yang tidak menentu dan kurang terkendali, PHK besar-besaran, menguatnya ekonomi informal dan melemahnya posisi ekonomi Indonesia secara global mewarnai perubahan ekonomi pascareformasi. Liberalisasi di masyarakat juga sering memunculkan gejala di masyarakat bawah, konflik horizontal semakin sering terjadi, dan secara vertikal masyarakat bahkan bisa mengintervensi instrumen negara. Secara budaya muncul kecenderungan individualisme yang kuat menggantikan komunalisme masyarakat. Liberalisasi masyarakat telah sedikit demi sedikit menghancurkan struktur budaya masyarakat.

Secara umum, perubahan yang cukup penting dalam pemahaman dan kesadaran masyarakat adalah menyebarnya ide tentang kesetaraan, kebebasan dalam berpendapat atau aspirasi dan pengakuan hak warga negara. Di sisi lain, kewajiban warga negara, pejabat negara dan para pemimpin lainnya kurang

mendapat perhatian sebagai salahsatu prasyarat berjalannya sistem dengan baik. Sehingga arah perubahan menjadi sesuatu yang tidak dapat dipastikan, namun mengalir mengikuti alur kepentingan pihak-pihak yang berkuasa.

Sebagian masyarakat yang merasa tidak memperoleh pengaruh langsung dari reformasi, misalnya para pegawai negeri dan masyarakat yang mapan serta masyarakat yang apolitis, akan memandang reformasi kurang atau tidak berpengaruh terhadap kehidupan mereka. Sedangkan mereka yang mendapatkan keuntungan, merasa reformasi lebih baik. Di sisi lain, kondisi menengah ke bawah merasakan semakin sulitnya kehidupan pascareformasi, akibat kesulitan ekonomi. Tabel di atas juga menunjukkan bahwa ide mengenai kebebasan mendapatkan perhatian yang besar dari masyarakat. Kebebasan adalah kata kunci yang cukup penting bagi masyarakat dalam menempatkan dirinya dalam relasi sosial politik secara vertikal maupun horizontal.

Sebagian lagi merasakan adanya perbaikan kehidupan sosial. Perhatian terhadap masyarakat meningkat, keadilan ditegakkan, ada perbaikan sistem serta kesejahteraan menjadi lebih baik dirasakan oleh sebagian warga. Mereka yang mendapatkan posisi lebih baik atau keuntungan pascareformasi akan berpendapat seperti ini. Akan tetapi sebaliknya, terutama bagi kalangan menengah ke bawah, perubahan-perubahan pascareformasi bahkan lebih mempersulit hidup mereka. Semakin langkanya lapangan pekerjaan, harga barang kebutuhan yang menjadi tinggi dan tidak terkendali serta perilaku ekonomi yang tidak dibatasi aturan menjadikan kondisi semakin sulit. Mereka berpendapat bahwa reformasi memberikan pengaruh yang merugikan bagi masyarakat.

Tidak hanya terhadap kebijakan dan situasi saat ini, kekecewaan sebagian

masyarakat juga tertuju pada perilaku elit politik atau pejabat publik. Pemberitaan yang gencar di media massa mengenai kasus korupsi dan perilaku elit pada saat pemilu cukup menjadi bukti bagi masyarakat untuk menunjukkan kekecewaan mereka. Sebagian masyarakat menyesalkan situasi yang tidak menentu dan banyaknya perilaku yang tidak diharapkan terjadi. Akan tetapi walaupun terdapat kekecewaan yang besar terhadap elit politik atau pejabat publik, masyarakat belum memiliki mekanisme yang cukup untuk menghukum para elit tersebut melalui partisipasi politik. Memang ada kecenderungan partisipasi memilih menurun karena kekecewaan, tetapi masih banyak pihak dalam kesempatan lain tetap bekerjasama dengan elit.

Berdasarkan penjelasan di atas, situasi yang umum terjadi adalah adanya ketidakpastian kondisi politik pascareformasi yang cukup membingungkan masyarakat. Satu sisi reformasi memberikan kebebasan yang membuka berbagai kesempatan kepada masyarakat untuk mengejar kepentingannya, di sisi lain banyaknya kesempatan tersebut membawa berbagai dampak yang tidak diinginkan masyarakat.

Pengaruh reformasi juga cukup kuat dalam memberikan kesadaran baru berkehidupan sosial di lingkungan. Kesetaraan dan kebebasan memberikan pengaruh berkurangnya patrimonialisme yang sebelumnya cukup kuat. Dalam kehidupan bermasyarakat, kedudukan orang-orang yang memiliki sumberdaya, seperti harta, pendidikan, dan status sosial lainnya cukup di hormati, akan tetapi pascareformasi, kondisi tersebut mulai mengalami pergeseran, walaupun belum sepenuhnya berubah.

Hal tersebut bisa dilihat dari latarbelakang warga yang menduduki jabatan sosial di masyarakat. Pengurus lembaga kemasyarakatan seperti LPMK,

RW, RT atau PKK kini semakin banyak yang berasal dari kalangan biasa. Mereka berasal dari kalangan menengah ke bawah dengan jenjang pendidikan SLTA dan sebagian bekerja sebagai buruh atau swasta. Berdasarkan usia, semakin banyak kalangan usia muda yang dipercaya memimpin masyarakat.

Orientasi Afektif

Ide-ide tentang kesamaan/ kesetaraan dan kebebasan berpendapat dapat dilihat aktualisasinya dalam berbagai kegiatan masyarakat. Sebelum reformasi, keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan publik sangat kecil, akan tetapi pascareformasi keterlibatan tersebut meningkat, dalam bentuk partisipasi memilih, menyampaikan pendapat atau intervensi melalui protes, demonstrasi, dan lain sebagainya.

Reformasi memberikan pengaruh yang cukup kuat terhadap keterlibatan masyarakat terhadap aktifitas politik nasional, secara umum terjadi perubahan ke arah semakin aktif. Masalah-masalah politik dan kebijakan pemerintah telah menjadi perhatian utama pemerintah, sejalan dengan semakin luasnya pembicaraan di media. Semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam aktifitas politik, seperti partai politik atau tim sukses dalam pemenangan pemilu. Pergantian rezim yang berpengaruh terhadap pergantian sistem politik memicu peningkatan yang cukup besar dalam aktifitas politik masyarakat.

Perkembangan sistem kepartaian dan pemilu, menyebabkan tingkat aktifitas dalam kegiatan tersebut sangat tinggi. Banyaknya pemilihan yang membutuhkan peran lebih banyak orang, memberikan kesempatan pekerjaan sampingan kepada berbagai kalangan. Berdasarkan keterangan sebagian informan, mereka pernah mendapatkan berbagai tawaran yang pada Orde Baru tidak mereka

dapatkan, baik dari calon legislatif maupun partai politik untuk terlibat dalam kemenangan pemilu.

Kebijakan massa mengambang yang diterapkan rezim Orde Baru, kemudian berubah drastis pada masa reformasi, menimbulkan ledakan partisipasi politik masyarakat. Bahkan kalangan tertentu yang seharusnya bebas dari kepentingan politik, terutama pegawai negeri, kini telah terlibat, walaupun secara tidak langsung dalam kemenangan pemilu. Jika sebelumnya ada istilah politisasi birokrasi, maka saat ini yang menguat adalah birokrat berpolitik. Mereka mendukung salah satu calon kepala daerah, dengan harapan mendapatkan imbalan jika yang didukung menang. Berbagai macam dukungan secara tidak langsung dengan memanfaatkan jaringan antar mereka.

Kepedulian masyarakat terhadap hasil kebijakan juga meningkat. Partisipasi dalam proses perumusan kebijakan, walaupun masih tergolong kecil, tetapi mengalami peningkatan dibanding sebelum reformasi. Berbagai program yang diusulkan warga dalam Musrenbang selalu berasal dari usulan dalam pertemuan RT, kemudian dilanjutkan di tingkat kelurahan. Secara langsung maupun tidak langsung, warga lebih sering memberikan masukan dan evaluasi terhadap kebijakan dan kinerja pemerintah di daerah masing-masing. Pergeseran tersebut merupakan hasil dari proses pembelajaran masyarakat terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Misalnya, jika masa Orde Baru warga datang ke TPS karena takut atau rasa *ewuh pekewuh*, pada saat ini warga datang ke TPS karena kesadaran atau bahkan alasan finansial.

Kedekatan masyarakat dengan politik juga diwujudkan melalui kontrak politik secara langsung dengan para elit. Dalam pemilihan kepala daerah, ada

kesepakatan untuk memenangkan satu calon tertentu dengan kompensasi perbaikan fasilitas lingkungan.

Berbagai perubahan serupa juga terjadi pada kegiatan kemasyarakatan di lingkungan. Keterlibatan dalam lingkungannya semakin meningkat karena dorongan ide tentang kesamaan dan kebebasan dalam masyarakat. Hanya saja perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor waktu, faktor usia memaksa seseorang harus lebih aktif dalam kegiatan lingkungan.

Pergeseran yang cukup berarti dalam pemahaman masyarakat. Jika sebelumnya warga aktif dalam kegiatan RT karena rasa *ewuh pekewuh*, saat ini warga aktif karena membutuhkan, menyadari pentingnya konsolidasi bersama, walaupun tidak semua warga mengaktualisasikannya dalam kegiatan nyata.

Di lingkungan tempat tinggal, warga merasa lebih mendapatkan kebebasan berbicara, lebih berani mengeluarkan aspirasi tanpa rasa takut. Ide-ide tentang persamaan/kesetaraan dan kebebasan menginspirasi dalam kehidupan sosial. Tidak takut mengeluarkan pendapat merupakan sistem nilai yang kini tumbuh dan menyebar di masyarakat.

Namun luasnya kesempatan tersebut juga belum serta merata dimanfaatkan secara baik oleh segenap warga. Dalam banyak forum pertemuan warga, hanya segelintir warga yang aktif menyampaikan pendapat, kebanyakan belum memanfaatkan momentum tersebut karena berbagai alasan, diantaranya karena tidak memiliki kepentingan langsung, tidak memiliki kepedulian, bahkan ada anggapan bahwa jika seseorang terlalu aktif, akan memiliki kemungkinan besar untuk ditunjuk menjadi pengurus lembaga kemasyarakatan yang biasanya dihindari banyak orang.

Berbeda dengan suasana pada forum pertemuan warga atau organisasi kemasyarakatan lainnya, dalam relasi kehidupan sehari-hari, bentuk nyata dari ide mengenai kebebasan, kesetaraan dan persamaan adalah munculnya kecenderungan "pembangkangan" terhadap norma, aturan dan kebijakan sosial. Pembangkangan yang dimaksud adalah kepedulian warga terhadap persoalan sosial menurun, dan lebih mengutamakan persoalan pribadi. Saling memahami kepentingan orang lain dan kesadaran untuk berbagi menjadi semakin menurun, dan kebebasan berarti setiap orang boleh melakukan apapun. Dalam masyarakat dengan tradisi komunal di mana kepedulian untuk memahami kepentingan orang lain, kesadaran berbagai dan saling menjaga dijunjung tinggi, pascareformasi semakin mendapat guncangan.

Pengorbanan warga untuk urusan sosial juga berkurang, bahkan sering terjadi penyerobotan hak publik oleh warga dengan alasan kebebasan. Kebersamaan yang bernuansa kesetaraan mulai berkurang. Warga yang lebih mampu secara ekonomi lebih senang membayar denda dibanding datang untuk kerja bhakti atau bertugas jaga malam. Kondisi di atas menyebabkan reformasi dalam tataran kehidupan masyarakat yang berarti kebebasan lebih bermakna segalanya bisa atau semaunya sendiri.

Orientasi Evaluatif

Ukuran mengenai apa yang dianggap baik dan kurang baik, ada yang berubah dan ada yang masih sama. Perubahan ukuran mengenai sistem politik yang baik ialah mengenai prosesnya, sedangkan yang masih tetap sama ialah situasi yang diharapkan.

Proses yang melibatkan lebih banyak orang dipandang lebih baik dibanding sedikit orang. Pada masa Orde

Baru orang lebih mempercayakan kepada mereka yang dianggap mampu dan memiliki pengetahuan lebih untuk menyelesaikan sebuah persoalan, akan tetapi saat ini warga lebih menginginkan keterlibatan yang luas dari seluruh warga. Misalnya, jika sebelumnya pemilihan ketua RT atau RW hanya melibatkan segelintir orang, saat ini lebih banyak orang yang terlibat bahkan mekanisme pemilu mulai digunakan di banyak daerah untuk memilih ketua RT/RW.

Situasi yang sama tetap diharapkan masyarakat adalah keteraturan dan tidak melenceng dari norma. Walaupun bebas tetapi tetap memperhatikan aturan dan tata norma yang berlaku. Masyarakat tidak menghendaki suatu perubahan ekstrim yang lepas dari norma kehidupan dan menimbulkan instabilitas. Stabilitas adalah situasi yang selalu diharapkan masyarakat. Konflik yang terbuka dan benturan-benturan langsung tidak dikehendaki masyarakat. Konflik biasanya bersifat laten dan tersembunyi, yang muncul dalam situasi tertentu saja.

Pemaknaan umum di masyarakat, sesuatu yang baik ialah ketika tercipta situasi demokrasi yang nilai utamanya adalah kebebasan yang tidak melanggar aturan atau norma. Kebebasan yang tidak melanggar aturan menempati posisi utama dalam wacana politik masyarakat sebagai satu-satunya standar yang paling baik. Sebagian besar informan meyakini bahwa reformasi telah memberikan pengaruh yang baik terhadap demokrasi dan pelaksanaannya di tingkat nasional maupun lingkungan mereka dengan adanya kebebasan. Namun ada juga sebagian yang menganggap reformasi membuat demokrasi tidak bertambah baik, karena kebebasan yang dimakni itu terlalu berlebihan, masyarakat menyebutnya sebagai kebablasan, lepas dari norma dan standar umum yang dikehendaki masyarakat, terutama dalam hal perilaku.

Dengan demikian ada sebagian besar yang menganggap demokrasi pascareformasi semakin baik dan sebaliknya.

Budaya Politik Pascareformasi

Perubahan politik pascareformasi telah membawa pengaruh berupa pergeseran pemahaman, konsep, keyakinan, ide dan praktik berpolitik masyarakat baik dalam bersentuhan dengan sistem politik nasional maupun sistem politik lokal mereka. Namun perubahan tersebut sebatas nilai-nilai yang masih dangkal dan belum menyentuh substansi demokrasi sesungguhnya. Di satu sisi masyarakat mengharapkan terciptanya kondisi kebebasan dan partisipasi, di sisi lain masyarakat menghindari konflik dan perubahan. Segala sesuatu harus sejalan dengan norma dan aturan yang menjaga ketertiban.

Reformasi belum mengubah secara mendasar budaya politik masyarakat, perubahan hanya menyentuh nilai-nilai yang dangkal dengan praktek yang belum menghasilkan bentuk nyata demokrasi sesungguhnya. Saat ini sedang terjadi pergulatan antara nilai-nilai demokrasi, baik yang lama maupun baru dengan nilai-nilai non demokrasi baik yang lama maupun baru. Reformasi telah memberikan wacana dan praktek baru tentang demokrasi maupun non demokrasi yang berinteraksi dengan nilai-nilai lama dalam masyarakat.

Disamping memberikan peluang pada perbaikan kehidupan yang demokratis, reformasi juga telah memfasilitasi berbagai tindakan nondemokratis yang sebelumnya tersembunyi dalam benak masyarakat. Dengan alasan demokrasi, berbagai tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum mendapat peluang. Era demokrasi dimaknai sebagai apapun boleh dilakukan oleh masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis data diatas, maka dapat dirumuskan simpulan bahwa perubahan politik pada level prosedural pascareformasi belum mengubah secara mendasar budaya politik menuju demokrasi di Kecamatan Banyumanik. Perubahan prosedural pascareformasi membawa pengaruh pada pemahaman nilai dan perilaku, akan tetapi perubahan terjadi secara bertahap dan sebagian, belum mengubah secara keseluruhan dan mendasar. Perubahan terjadi pada perilaku di level permukaan yang sifatnya seremonial, dan kurang menyentuh nilai-nilai substansial. Namun demikian, di sisi lain saat ini juga sedang terjadi proses pergulatan nilai dan perilaku dalam masyarakat antara nilai-nilai demokratis dan non demokratis, antara nilai-nilai demokrasi lama dan baru, antara nilai non demokrasi lama maupun baru. Masyarakat memahami adanya sebuah proses dialektika dalam masyarakat, bahwa reformasi sebagai salahsatu jalan perubahan yang bertahap. Ada kemunduran atau kemajuan, tetapi akan menuju satu titik perubahan, jika terdapat contoh perilaku yang konstruktif dari para elit, karena saat ini kepercayaan terhadap elit dan pemerintah cukup rendah.

SARAN

Berdasarkan simpulan penelitian diatas, maka saran untuk berbagai pihak terkait agar reformasi memberikan pengaruh yang lebih baik terhadap budaya politik masyarakat, maka pemerintah, elit politik dan partai politik perlu melakukan upaya pendidikan politik yang terus menerus untuk membentuk dukungan masyarakat dalam pembangunan sistem politik demokratis, yang dilakukan terutama dengan contoh perilaku demokratis oleh para elit politik dan pejabat publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo, 2007, *Perihal Ilmu Politik; Sebuah Bahasan Memahami Ilmu Politik*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Arikunto, Suharsini, 2000, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta
- Chilcote, Ronald H, 2007, *Teori Perbandingan Politik: Penelusuran Paradigma, diterjemahkan dari judul asli "Theories of Comparative Politics The Search for a Freedom" oleh Haris Munandar dan Dudi Priatna*, Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Eko, Sutoro, 2004, *Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat*, APMD Press, Yogyakarta
- Haynes, Jeff, 2000, *Demokrasi dan Masyarakat Sipil di Dunia Ketiga: Gerakan Politik Baru Kaum Terpinggir, diterjemahkan dari judul asli "Democracy and Civil Society in the Third World Politics and New Political Movement" oleh P, Soemitro*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Marhan, Idrus, 2009, *Demokrasi Setengah Hati: Studi Kasus Elit Politik di DPRRI 1999-2004*, Ringkasan Desertasi Program Doktor Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Jogjakarta, <http://lib.ugm.ac.id>
- Priyono, A.E., dkk, 2004, *Transisi Demokrasi Telah Dibajak*, Majalah Tempo, 10 Oktober 2004. <http://www.demosindonesia.org>.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta Bandung
- Zuhro, R, Siti, dkk, 2009, *Demokrasi Lokal: Perubahan dan Kesenambungan Nilai-nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Bali*, Ombak, Yogyakarta